

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN IMPLIKASI**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Selama ini bidang pendidikan masih dijadikan media atau alat untuk meningkatkan popularitas (populis) bagi parpol atau calon kepala daerah terutama menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
2. Walaupun sudah terbit Peraturan Pemerintah No. 38 tentang Pembagian Urusan, namun secara tegas belum ada kejelasan pembagian urusan antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang akan berdampak kepada struktur, tata kerja organisasi, alokasi kuantitas dan kualitas SDM serta anggaran sehingga tanggung jawab menjadi jelas.
3. Dengan belum adanya kejelasan kewenangan maka banyak terjadi pelanggaran terhadap aturan khususnya dalam pengalokasian anggaran yang mengakibatkan, Belanja Tidak Langsung (BTL) dalam struktur APBD pemerintah Propinsi Jawa Barat menjadi jauh lebih di atas Belanja Langsung (BL), padahal sistem anggaran sudah mengarah kepada Anggaran Berbasis Kinerja
4. Dalam proses penyusunan anggaran pihak DPRD menginginkan alokasi bantuan sebagai perwujudan memenuhi janji daerah pemilihan, demikian juga Organisasi Perangkat Daerah menginginkan hal yang sama. Apabila dicermati, maka kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya hubungan "patron-klien" di lingkungan pemerintah baik antar pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakatnya.

5. Dalam proses perencanaan pendidikan, bidang pendidikan masih ditempatkan sebagai salah satu sektor pembangunan; bahkan lebih sempit lagi pendidikan diartikan sebagai persekolahan yang menjadi milik pemerintah atau sekolah negeri.
6. Sebagai wujud nyata otonomi dan desentralisasi, diperlukan perbaikan proses perencanaan melalui pengusulan satu alternatif Model Perencanaan Pendidikan Partisipatif yang Berbasis Kewilayahan (PPPBK) untuk memperbaiki kinerja perencanaan pembangunan.
7. Karena model perencanaan ini merupakan model baru, maka untuk implementasi diperlukan strategi implementasi melalui manajemen perubahan, dalam hal ini penerapan model dilakukan secara gradual sambil membuka peluang terjadinya interaksi pembelajaran antar *stakeholders*.
8. Dengan Model Perencanaan Partisipatif yang Berbasis Kewilayahan maka orientasi perencanaan tidak lagi merencanakan orang lain tapi, memfasilitasi perencanaan secara bersama sama.
9. Model Perencanaan Pendidikan Partisipatif yang Berbasis Kewilayahan ini, bersifat holistik dan sesuai dengan aturan baik legal maupun etikal, efektif, serta membuka peluang lebih besar lagi untuk terjadinya interaksi proses pembelajaran antar *stakeholders* yang akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
10. Di dalam manajemen perubahan, selalu terjadi adanya kelompok yang mendukung dan menolak perubahan, sehingga dirancang sebuah strategi komunikasi yang efektif termasuk menghilangkan kemungkinan adanya

kesan eksklusif terhadap program dan pengelolanya sehingga seperti terpisah dari lingkungan sekitarnya.

11. Perencanaan Pendidikan Partisipatif yang Berbasis Kewilayahan akan mendorong reformasi birokrasi di bidang pendidikan termasuk adanya perbaikan insentif bagi pengelola internal ke arah Insentif Berbasis Kinerja (IBK).

## **B. REKOMENDASI**

1. Sebagai konsekuensi dari Desentralisasi dan pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya dalam bidang pendidikan, maka dalam aspek kelembagaan harus diikuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Likuidasi lembaga-lembaga vertikal di daerah, baik itu kantor wilayah di daerah propinsi dan kantor departemen di daerah kabupaten/kota (kecuali untuk urusan yang masih dipegang pusat);
  - b. Perampingan struktur kelembagaan di propinsi seperti hilangnya beberapa struktur kedinasan (kecuali untuk urusan yang bersifat lintas/antar daerah kabupaten/kota);
2. Perampingan struktur di tingkat pemerintah pusat, fungsi departemen teknis akan diganti oleh yang bersifat koordinatif dan fungsional, terutama untuk menjawab kebutuhan kewenangan departemen teknis yang bersifat lintas daerah propinsi.
3. Berkaitan dengan kondisi tersebut, di masa yang akan datang struktur kelembagaan pemerintah akan terkonsentrasi di daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ini perlu diantisipasi karena akan berdampak baik dalam jangka panjang. Akan tetapi ada masa transisi, dimana pemerintah daerah dihadapkan kepada berbagai keterbatasan serta konflik yang cukup berat dalam menata aspek kelembagaan ini. Di satu sisi budaya “ewuh pakewuh” masih tertanam, adanya motif power pusat yang masih kuat ditambah lagi sifat ketergantungan yang masih tinggi akan dirasakan eksistensinya, kebiasaan memilih pola maksimal akan sangat dibatasi oleh kemampuan keuangan. Dilain pihak, ada kebutuhan untuk tetap mempertahankan *status quo* dengan menciptakan institusi baru untuk menampung organisasi yang dihapuskan.

4. Mengantisipasi perubahan-perubahan pada lingkungan strategis, maka diperlukan perbaikan model perencanaan pembangunan pendidikan yang partisipatif yang didukung oleh sistem pendukung keputusan (SPK) berbasis teknologi informasi, sehingga menuntut peningkatan kapasitas aparat di lingkungan pemerintahan terutama penguasaan bahasa dan teknologi informasi melalui pengembangan kapasitas (*Capacity Building*)
5. Perencanaan Pendidikan Partisipatif Berbasis Kewilayahan (PPPBK) merupakan alternatif usulan Model Perencanaan Pendidikan Partisipatif sebagai rintisan ke arah reformasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat karena kekuatan misinya dalam upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*).

### C. IMPLIKASI

Mencermati Proses dan hasil pengkajian terhadap sistem perencanaan pendidikan yang ada di Propinsi Jawa barat, maka terjadi ketidak-efisienan dalam penggunaan sumber daya khususnya penganggaran untuk unit kerja.

Upaya-upaya perbaikan kinerja perencanaan terus dilakukan seperti pengembangan model PPK-IPM hasilnya sudah cukup baik, karena memperbaiki proses perencanaan secara partisipatif walaupun dalam jangka pendek masih belum optimal karena perbaikan kinerja perencanaan tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Pada tingkat propinsi, arah pengembangan program adalah memberikan fokus khusus untuk peningkatan kinerja perencanaan Kabupaten/kota dengan memberikan pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) perencanaan kepada aparat kabupaten/kota dengan berbagai cara dan media sehingga kegiatan tidak langsung ke masyarakat namun lebih banyak memperbaiki kinerja aparat perencana di kabupaten/kota secara interaktif dan dalam proses pembelajaran (*learning*).

Penggunaan Metoda Proses Hirarki Analitik (PHA) yang sejauh ini pernah diuji coba untuk perencanaan dan penganggaran di Propinsi Jawa Barat, cukup ideal untuk digunakan sebagai model alternatif untuk perbaikan kinerja proses perencanaan. Penggunaan model perencanaan pendidikan yang dilengkapi dengan penggunaan PHA untuk perencanaan pendidikan partisipatif di Propinsi Jawa Barat merupakan model yang bisa digunakan sebagai transisi untuk mendorong menuju reformasi birokrasi yang salah satunya melalui penyusunan agenda restrukturisasi dan rasionalisasi PNS di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.